

KONTRIBUSI WARMADEWA DALAM KEBIJAKAN EKOWISATA

A. A. Ayu Dewi Larantika
Fisip Universitas Warmadewa
agungdewilarantika@gmail.com

Abstrak

Pembangunan kepariwisataan di Bali berperan penting dalam perekonomian masyarakat. Namun tanpa disadari eksplorasi pariwisata berdampak pada lingkungan dan budaya masyarakat Bali. Hal tersebut dapat dilihat dari alih fungsi lahan, pergeseran nilai-nilai budaya dan gangguan ketertiban sosial lainnya yang semakin marak. Untuk meminimalisir dampak negatif industri pariwisata, pemerintah mengembangkan pembangunan pariwisata ekologi (*ecotourism*) atau pembangunan pariwisata berkelanjutan dalam bentuk ekowisata. Implementasi kebijakan ekowisata memiliki kendala yang harus dihadapi oleh aktor-aktor kebijakan. Pemerintah sebagai pemegang kendali kebijakan selayaknya melibatkan aktor lain seperti universitas untuk dapat berkontribusi didalamnya. Tulisan ini mendeskripsikan kontribusi universitas dalam hal ini Warmadewa sebagai salah satu aktor dalam kebijakan ekowisata di Bali.

Pendahuluan

Pembangunan pariwisata di Indonesia sejak dahulu hingga sekarang masih menjadi prioritas dan menempati posisi yang strategis. Terlebih lagi di Bali, pariwisata merupakan jantung perekonomian masyarakat Bali. Pariwisata yang berkembang membuat tingkat kesejahteraan terjaga. Sedemikian pentingnya keberadaan pariwisata dan keberlanjutannya bagi masyarakat Bali, hingga pemerintah senantiasa berupaya untuk menjaga keberlanjutannya dan berupaya menekan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata itu sendiri.

Dampak negatif dari pengembangan pariwisata disadari atau tidak telah mempengaruhi sisi kehidupan masyarakat Bali. Seperti misalnya eksplorasi pariwisata

dapat berpengaruh pada alih fungsi lahan di beberapa tempat, pergeseran nilai-nilai budaya serta munculnya gangguan ketertiban sosial lainnya. Untuk meminimalisir dampak negatif dari industri pariwisata, maka pengembangan pariwisata yang didasarkan pada keunikan dan kondisi wilayah dapat dikembangkan dengan mengimplementasikan pembangunan pariwisata ekologi (*ecotourism*) atau pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*) dalam bentuk ekowisata.

Pengertian ekowisata di Indonesia dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, yaitu "*Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang*

bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal". Berdasarkan pengertian tersebut, ekowisata merupakan bentuk wisata yang harus mengkombinasikan beberapa hal sebagai berikut: (1) perjalanan ke suatu kawasan (seperti hutan alam, goa, kehidupan bawah laut, kehidupan masyarakat hukum adat, kehidupan perkotaan, dan sebagainya), (2) aktivitas pembelajaran (*learning*) dalam rangka meningkatkan pengalaman wisatawan, (3) menggalakkan upaya konservasi flora, fauna, dan budaya, serta (4) mengembangkan kepedulian dan kapasitas masyarakat lokal. Dengan demikian, ekowisata dapat dibedakan menurut tujuan obyek dan daya tarik wisata (ODTW) yang dipilihnya, jenis pengalaman yang diinginkanya, tingkat perhatian konservasi sumber daya alamnya dan tingkat partisipasi masyarakat yang diharapkan.

Dalam realitanya pembangunan kepariwisataan di Indonesia umumnya dan Bali khususnya masih belum mampu mewujudkan pariwisata yang ekowisata (*ecotourist*). Karena pariwisata massal (*mass tourism*) yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan masih mendominasi praktek pengembangan pariwisata. Penyebab kurang tergalinya dan terkelolanya objek ekowisata (Ferdinal Asmin, 2018) dapat dilihat dalam konteks sistem kepariwisataan itu sendiri, yaitu adanya kendala pada sisi suplai (*product driven*), kurangnya pemahaman terhadap pasar (*market driven*),

banyaknya kendala dalam kelembagaan dan kurangnya dukungan kebijakan.

Empat kendala atau keterbatasan dalam pengembangan ekowisata merupakan kenyataan yang dihadapi oleh semua *stakeholder* dalam kepariwisataan. Menjadi tugas pemerintah sebagai pemegang kendali dalam membuat strategi dan kebijakan yang melibatkan berbagai pihak untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan kepariwisataan. Sehingga kelemahan dalam pemahaman konsep ekowisata, penentuan tujuan pengembangan, pilihan alternatif wisata, peningkatan kelembagaan maupun perumusan kebijakan dapat teratasi. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memaksimalkan keterlibatan aktor kebijakan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan ekowisata.

Sebagai salah satu aktor kebijakan, lembaga universitas di era *governance* memiliki posisi penting. Demikian halnya dengan Universitas Warmadewa yang memiliki visi menjadi universitas bermutu yang berwawasan ekowisata dan berdaya saing global tahun 2034 (Statuta Universitas Warmadewa, 2018). Terkait dengan visi tersebut maka Universitas Warmadewa selayaknya terlibat dalam rangka merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan ekowisata di Bali. Tidak semata-mata menjadi visi diatas kertas. Oleh karenanya menjadi menarik untuk mengulas tentang kontribusi Warmadewa dalam kebijakan ekowisata di Bali.

Metodologi

Untuk menjawab pertanyaan bagaimana kontribusi Warmadewa dalam kebijakan ekowisata di Bali, digunakan analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif (Moleong, 1991) diawali dengan mengumpulkan data deskriptif dalam bentuk informasi terkait dengan peran universitas/universitas dalam kebijakan ekowisata. Data sekunder dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi dari peraturan, jurnal, artikel dan buku tentang ekowisata yang dielaborasi dan dibahas untuk disimpulkan.

Hasil dan Pembahasan

Dalam implementasi kebijakan di Era *governance* dicirikan dengan keterlibatan berbagai aktor atau *stakeholder*. Aktor dalam kebijakan menurut Howlett dan Ramesh (1995) adalah pemerintah, masyarakat, kelompok kepentingan, swasta, universitas (organisasi peneliti, kelompok ahli), dan media massa. Demikian pula dalam kebijakan ekowisata, keterlibatan aktor lain selain pemerintah dan pelaku wisata adalah masyarakat, media massa dan universitas. Keterlibatan universitas dalam kebijakan ekowisata terkait dengan peran universitas sebagai aktor yang memberikan kajian ilmiah atas berbagai hal terkait ekowisata.

Untuk mengkaji suatu tempat pantas dijadikan obyek wisata yang memenuhi kriteria kecukupan sumber daya serta dampak yang ditimbulkan akibat pengembangan obyek wisata bagi masyarakat disekitarnya,

dibutuhkan keterlibatan universitas dengan kajian-kajian ilmiahnya. Sehingga pemilihan alternatif, tujuan pengembangan serta peningkatan kelembagaan dapat dituangkan dalam penyusunan kebijakan ekowisata yang nantinya diimplementasikan sesuai kondisi yang ada. Rencana yang disusun dalam perumusan kebijakan diharapkan mampu menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pengembangan ekowisata. Sehingga peran universitas dalam suatu kebijakan dimulai dari proses perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan ekowisata.

Prinsip pengembangan ekowisata diarahkan pada penggalian obyek wisata alam yang belum berkembang. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaring wisatawan yang sudah berubah orientasi wisatanya mengarah pada wisata alternatif atau memilih wisata minat khusus. Pengembangan obyek wisata baru wajib dikaji oleh para pakar secara multidisipliner. Karena pengembangan obyek wisata tidak semata-mata berorientasi pada keindahan dan keuntungan, namun juga harus memperhitungkan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan alam. Hal tersebut membedakan ekowisata dengan wisata lainnya. Dalam hal inilah universitas memegang peran penting bagi kebijakan ekowisata.

Sebagai produk wisata yang menitik beratkan pada aspek pendidikan dan informasi, aspek sosial budaya, aspek lingkungan, aspek estetika, aspek etika dan reputasi, maka dalam perencanaan ekowisata harus diarahkan pada

konsep, prinsip, dan analisis pasar yang terkait dengan hal tersebut. Menurut From dalam Susilawati (2004) konsep ekowisata bersifat outdoor; akomodasi dicipta dan dikelola oleh masyarakat lokal; serta memiliki perhatian terhadap lingkungan alam dan budaya lokal. Berdasarkan konsep tersebut, kegiatan ekowisata memiliki prinsip-prinsip: 1) mengurangi dampak negatif dari pariwisata; 2) membangun kesadaran dan penghargaan; 3) menawarkan pengalaman-pengalaman positif; 4) memberikan keuntungan finansial; 5) meningkatkan kepekaan terhadap situasi sosial & lingkungan; 6) menghormati HAM.

Universitas sebagai instansi pendidikan berkontribusi untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu menjawab permasalahan dalam pengembangan ekowisata. Tidak hanya mengajarkan bagaimana menjadi penyedia pasar, akan tetapi bagaimana membuat kebijakan pariwisata yang sesuai dengan kondisi dan tujuan ekowisata dan memiliki sifat keberlanjutan. Keberlanjutan suatu obyek wisata akan terjadi apa bila masyarakat sekitar destinasi merasakan secara langsung manfaat positif dari kegiatan pariwisata. Oleh karena itu maka aspek sosial budaya menjadi perhatian utama dalam pembuatan kebijakan. Bagaimana menciptakan konsep pariwisata yang mampu mempertahankan orisinalitas suatu destinasi wisata sehingga mampu meminimalisir degradasi fundamental destinasi wisata yang di bawa oleh wisatawan.

Warmadewa sebagai institusi pendidikan telah berkontribusi dalam

kepariwisataan melalui kajian ilmiah terkait desa wisata dan program wisata, melalui pendampingan pembentukan desa wisata di beberapa kabupaten di Bali seperti Badung, Tabanan dan Gianyar. Namun masih belum maksimal karena kontribusi Warmadewa baru pada tataran implementasi kebijakan bukan pada perumusan kebijakan pariwisata. Warmadewa baru sebatas konsultan dalam mengkaji lokasi untuk dijadikan obyek wisata (desa wisata) dan mendampingi pemerintah dalam mewujudkan bentuk fisik desa wisata. Peran lebih terfokus pada implementasi kebijakan pariwisata yang dirumuskan pemerintah. Untuk dapat berkontribusi maksimal dalam kebijakan ekowisata sebagai program pariwisata berkelanjutan, semestinya Warmadewa ikut berpartisipasi mulai dari perumusan kebijakan, kemudian implementasi dan sampai pada evaluasi kebijakan itu sendiri.

Hasil kajian tentang sumber daya alam, kondisi sosial dan dampak wisata bagi masyarakat lokal bila suatu tempat dijadikan obyek wisata, diharapkan mampu mempengaruhi kebijakan yang akan dirumuskan pemerintah terhadap rencana suatu obyek wisata. Sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak semata-mata menguntungkan pelaku pariwisata dan pemerintah dalam jangka pendek. Namun secara berkelanjutan memberi manfaat positif bagi masyarakat, alam dan budaya dimana obyek wisata tersebut dikembangkan. Sehingga tujuan pembangunan ekowisata tercapai sesuai tujuannya.

Selain hasil kajian dan pendampingan dari universitas, penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi semestinya juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan ekowisata di Bali. Seperti penggunaan data elektronik tentang pencatatan data dan kunjungan wisatawan, penyediaan informasi tentang obyek wisata dan kriteria wisatawan yang berminat dan boleh datang ke obyek tersebut, sosialisasi terhadap masyarakat di sekitar obyek wisata sehingga dapat menekan konflik kepentingan yang muncul akibat pengembangan pariwisata. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimulai dari perencanaan kebijakan ekowisata, implementasi kebijakan tersebut sampai pada evaluasi kebijakan ekowisata.

Kerjasama antar aktor dalam suatu kebijakan memberi peluang setiap aktor untuk berkontribusi sesuai peran dan potensinya terhadap kebijakan tersebut. Demikian pula halnya dalam kebijakan ekowisata. Kerjasama antar aktor pemerintah, swasta (pelaku pariwisata), masyarakat lokal, media massa dan universitas sangat dibutuhkan. Kontribusi Warmadewa sebagai aktor universitas dalam kebijakan ekowisata di Bali masih harus ditingkatkan. Peningkatan kontribusi dapat dilakukan dengan mengintensifkan kerjasama antara Warmadewa dengan pemerintah sebagai *leading sector* dalam kebijakan ekowisata. Pemerintah harus bersedia membuka diri untuk melibatkan aktor-aktor kebijakan lain seperti universitas dalam perumusan kebijakan ekowisata. Kajian dari universitas juga harus merupakan kajian

ilmiah murni bukan semata karena pesanan. Bila semua aktor kebijakan dapat memainkan perannya sesuai porsinya, maka kendala dalam ekowisata akan dapat diminimalisir dan pengembangan ekowisata akan mencapai tujuannya.

Simpulan

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menanggulangi kendala dalam pengembangan ekowisata, diperlukan kebijakan yang melibatkan kerjasama semua aktor kebijakan. Kerjasama semua aktor memberi kesempatan aktor tersebut untuk berkontribusi sesuai peran dan kompetensinya masing-masing dalam pengembangan ekowisata. Kontribusi Warmadewa sebagai salah satu aktor kebijakan belum maksimal. Kontribusi dapat lebih maksimal bila keterlibatannya dimulai dari perumusan kebijakan ekowisata, tidak semata-mata pada implementasi kebijakan yang sudah ada. Kontribusi dapat dilakukan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kerjasama dengan pemerintah. Bila semua aktor kebijakan dapat memainkan perannya sesuai porsinya, maka kendala dalam ekowisata akan dapat diminimalisir dan pengembangan ekowisata akan mencapai tujuannya.

Daftar Pustaka

Asmin Ferdinal, 2018, Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai

- dari Konsep Sederhana, Bogor Agriculture University. <https://www.researchgate.net/publication/323309174>
- Universitas Warmadewa, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Warmadewa
- Prosiding Seminar Nasional Ekowisata, Peran Kepemimpinan dan Inovasi Penduduk Lokal dalam Pengembangan Ekowisata, Fakultas Pertanian Universitas Widyagama Malang, Nopember , 2013 ISBN:978-602-14594-0-9
- Susilawati, Pengembangan Ekowisata Sebagai Salah Satu Upayapemberdayaan Sosial, Budaya Dan Ekonomi Di Masyarakat, <http://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/viewFile/1690/1141>.
- Fitriana, Evi dan M.Khoiri Ridlwan, 2017, Proceeding of Community Development, Pengembangan Ekowisata Berbasis Industri Kreatif Berwawasan Kearifan Lokal di Palangkaraya, Vol.1 tahun 2017, halaman 269-278.
- Howlett, Michael and Ramesh M. 1995. Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Sub-System. Oxford University Press. London.
- Iis Ismar Pramala, 2018, Peran Institusi Pendidikan Tinggi Dalam Pengembangan Kapasitas Komunitas Desa Cibuntu Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat, Jurnal Administrasi Pendidikan Vol.XXV No.2 Oktober 2018
- Moleong, Lexy J., 1991, Metodologi Penelitian Kualitatif, UI Press, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah
- Peraturan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor: 273/Yas.Korps/X/2018 tentang Statuta